



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH **(LKjIP)**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji Syukue kami persembahkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatNya, laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 dapat diselesaikan. Laporan ini disusun merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dan dapat bermanfaat bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti diharapkan. Namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Rejang lebong

Akhir kata kami berharap agar Laopran Kinerja Pemerintah (LKJIP) ini dapat menjadi media pertanggung jawaban dimasa yang akan datang bagi seluruh staf di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong.



Ikhtisar Eksekutif

Secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2022 telah berhasil melaksanakan misi yang diembannya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong adalah arah dan tolok ukur yang jelas dari rumusan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong, sehingga dapat menggambarkan secara spesifik hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran. Sasaran yang ingin dicapai adalah adanya akuntabilitas kinerja yang lebih jelas dan terukur. Cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah dengan melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana telah diatur dan ditentukan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong serta indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 1 Tahun 2022. Dari 4 indikator kinerja utama semua indikator dapat tercapai, dan dilihat dari rata-rata capaian yaitu sebesar **80,39%** dengan rata-rata capaian **baik**.

Realisasi anggaran dan realisasi fisik kegiatan pada tahun 2022 ini dikarenakan capaian realisasi anggaran kegiatan mencapai **95,83 %** (hal ini sebagian besar disebabkan efisiensi anggaran dan dikembalikan ke kas Negara), Meskipun secara umum kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong sudah baik namun tidak dipungkiri terdapat beberapa kendala dan permasalahan sehingga masih perlu perbaikan dan berbagai strategi untuk menghadapi masa yang akan datang. Disamping itu akan melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai dengan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik, berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta berkelanjutan (sustainable) dengan segenap bantuan dari seluruh pihak yang terkait demi pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud

DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR	3
	DAFTAR ISI	
BAB I	PENDAHULUAN	6
	1.1. Tujuan Berdirinya OPD.....	7
	1.2. Tugas Pokok dan Fungsi	17
	1.3. Sumber Daya Manusia (SDM)	19
	1.4. Permasalahan Utam OPD Yang Dihadapi Saat ini dikaitkan dengan Visi Misi Kepala Daerah	23
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	25
	2.1. IKU (Indikator Kinerja Utama)	25
	2.2. Perjanjian Kinerja Kepala OPD Tahun 2021	26
	2.3. Rencana Aksi Uraian Ringkasan Perjanjian Kinerja Kepala OPD Tahun 2021	28
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	30
	3.1. Capaian Kinerja Organisasi	30
	3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021	31
	3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	36
	3.1.3 Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	38
	3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Standar Nasional.....	40
	3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan kinerja serta Alternatif solusi yang Telah dilakukan.....	41
	3.1.6 Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya	46
	3.1.7 Anaisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	51
BAB IV	PENUTUP	
	Kesimpulan Capaian Sasaran Strategis, Capaian Indikator.....	63

DAFTAR LAMPIRAN

1	PERJANJIAN KINERJA.....	67
2	RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2022.....	69
3	LAPORAN DATA KINERJA.....	73
4	PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

Pemerintah yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR RI Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPan RB No. 29 Tahun 2010 yang diubah menjadi PermenPan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong memiliki tugas dan fungsi membantu Bupati Rejang Lebong dalam menyelenggarakan Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021–2026 dan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2021–2026.

1.1. Tujuan Berdirinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang dinamis dan semakin kompleks dibutuhkan penanganan intensif dari pemerintah. Maksud dari penanganan intensif ini adalah pemerintah berupaya menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh dengan cara menciptakan ketahanan nasional dalam bidang, ideologi, politik, ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Upaya tersebut diimplementasikan Pemerintah salah satunya melalui pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri berperan dalam mempengaruhi perilaku dan karakteristik bangsa agar arah berkembang sesuai dengan arah dan tujuan Negara dan mampu menjawab permasalahan masyarakat.

Urusan utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah menjaga stabilitas sosial politik dan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Stabilitas sosial politik adalah suatu keadaan kondusif di bidang sosial politik agar pemerintah dapat menjalankan tugas pemerintah sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan program-program dan kebijakan pemerintah dengan optimal. Sedangkan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat adalah salah satu indikator terselenggaranya kondisi dinamis masyarakat guna memperlancar terselenggaranya proses pembangunan nasional dan tercapainya tujuan nasional. Pembangunan dan tujuan nasional telah tercapai bilamana telah terjamin keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang dalam prosesnya mengandung kemampuan membina, mampu mengembangkan potensi dan kekuatan

masyarakat dalam menangkal, mencegah, menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan segala bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Penyelenggaraan urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari 3 (tiga) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Badan Kesbangpol, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Badan Penganggulangan Bencana Daerah.

POHON KINERJA I
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2022

[illegible]

POHON KINERJA II
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2022

[illegible]

[illegible]

CASCADING BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK												
eselon II					ESELON III			ESELON IV			STAF	
No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator Sasaran	No	Program	Indikator Program (outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (output)	Sub Kegiatan	Indikator (output)	Penanggung jawab
1	Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP Daerah	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Akintabel dan Tepat waktu	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pencapaian Perangkat Daerah	SEKRETARIAT
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	SEKRETARIAT
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Adm Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	SEKRETARIAT
										Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	SEKRETARIAT
								Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umu Perangkat Daerah Yang tepat waktu	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	SEKRETARIAT
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	SEKRETARIAT
										Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	SEKRETARIAT
										Penyedia Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	SEKRETARIAT
										Penyedia Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	SEKRETARIAT
										Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	SEKRETARIAT
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	SEKRETARIAT

				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diadakan		Pengadaan Meubel	Jumlah paket mebel yang disediakan	SEKRETARIAT
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	SEKRETARIAT
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	SEKRETARIAT
				Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Keadaan Baik		Penyedia Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	SEKRETARIAT
							Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	SEKRETARIAT
							Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	SEKRETARIAT
							Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	SEKRETARIAT
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	SEKRETARIAT
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	SEKRETARIAT

2	Terwujudnya kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat Terwujudnya generasi muda yang terbebas dari pengaruh negatif kualitas hidup masyarakat	Angka Kriminalitas	Meningkatnya kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat	Persentase Peningkatan pemahaman terhadap kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di Kabupaten Rejang Lebong	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Birneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah dokumen program di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Birneka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan yang disusun	BID IDEOLOGI
										Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Birneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan kebangsaan, Bela negara, Karakter bangsa, pembauran kebangsaan, birneka tunggal Ika dan sejarah kebangsaan	BID IDEOLOGI
					3	PROGRAM Peningkatan PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelenbagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Jumlah partai politik yang tertib administrasi dan data yang akurat	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelenbagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelenbagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	BID POLITIK
										Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelenbagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelenbagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di	BID POLITIK
										Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelenbagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelenbagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	BID POLITIK

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh Kepala badan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

- 1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, merupakan unsur pimpinan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan membina dan mengkoordinasikan serta mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pelaksanaan penyusunan perumusan perencanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik khususnya teknis operasional di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dengan menyelenggarakan kegiatan penetapan kegiatan operasional, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, peningkatan kapasitas bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, agama, kemasyarakatan dan ekonomi serta politik dalam negeri sesuai norma, standar, prosedur, kriteria serta ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku searah kebijakan umum daerah.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Badan mempunyai fungsi :
- 3) Pengkoordinasian, pengharmonisasian dan pensinkronisasian dalam upaya pengaktualisasian penyusunan rencana program dan perumusan rencana strategis serta penetapan rencana kerja Badan yang merujuk pada Renstra Pemerintah Daerah, baik dengan unsur lingkup Badan maupun dengan unsur SKPD terkait lainnya melalui pengusulan program, permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan arah dan ketepatan pencapaian rencana program kerja sekaligus pemberian arahan dan petunjuk kepada bawahan baik pejabat struktural maupun pegawai non struktural sebagai pejabat fungsional baik fungsional tertentu maupun fungsional umum selaku pengadministrasi dan/atau petugas operasional umum dan teknis lingkup badan, agar dapat dipahami dan dilaksanakan serta konsekuen lingkup Badan, agar dapat dipahami dan dilaksanakan secara konsekuen sesuai

dengan norma, standard, prosedur dan kriteria serta ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Badan berdasarkan rencana program untuk harmonisasi dan sinkronisasi tugas pengadministrasian, bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni agama, kemasyarakatan dan ekonomi serta politik dalam negeri sekaligus pendistribusian tugas kepada sekretariat dan bidang – bidang, agar kegiatan rencana kerja dapat berjalan efektif, lancar dan sinergis dengan kebijakan umum pemerintah daerah dengan prinsip tertib administrasi, tertib anggaran, tertib program, tertib pelaksanaan dan hukum serta tertib pengawasan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria serta ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan Desentralisasi dan Dekonsentrasi berdasarkan kewenangan untuk menunjang stabilitas daerah sekaligus pengkoordinasian kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan program kegiatan Badan serta penetapan standar pelayanan minimal sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria serta ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
- c. Memfasilitasi kegiatan badan sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan program agar penanganan permasalahan tepat sasaran, serta melaksanakan kegiatan kerja sama dibidang Kesatuan bangsa dan Politik dengan instansi terkait, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, instansi vertikal dan mitra kerja sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria merujuk pada kebijakan umum daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk sinkronisasi program;
- d. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan program kegiatan operasional bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, agama, kemasyarakatan dan ekonomi serta politik dalam negeri serta

urusan kesekretariatan, kerumahtanggaan dan ketatalaksanaan badan dengan prinsip tertib administrasi, tertib program, tertib anggaran, tertib pelaksanaan dan hukum serta tertib pengawasan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria serta ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

- e. Pengidentifikasian permasalahan yang timbul berkenaan dengan kegiatan program kesatuan bangsa dan politik serta mengupayakan alternatif pemecahannya untuk dijadikan saran dan masukan bagi pimpinan atas langkah dan tindakan yang diambil dalam menunjang kelancaran tugas kedinasan;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan system pengendalian intern pemerintah (SPIP) secara berjenjang, pembinaan dan pengendalian serta bimbingan tugas – tugas teknis dan non teknis aparatur lingkup badan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- g. Pengkoordinasian monitoring dan evaluasi serta pelaporan secara berkala kepada pimpinan atas pelaksanaan program strategis badan untuk dijadikan bahan kebijakan dan pertimbangan lebih lanjut serta bahan penyusunan Lakip Badan sesuai Sakip; dan
- h. Pembinaan dan pengkoordinasian kelompok jabatan fungsional serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan dan/atau diperintahkan oleh Bupati sesuai ruang lingkup tupoksi dan tanggung jawab kewenangannya.

1.3. Sumber Daya Manusia

Dalam Melaksanakan tugas pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 47 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 25 Orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 21 orang Harian Lepas (Non PNS) dari 26 orang pegawai tersebut , sebanyak 11 orang Laki-laki dan 15 orang Perempuan., dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.
Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Eselon

No	Jenis kelamin	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Harlep	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Laki-laki	1	1	4	5	11	21
2	perempuan	-	4	7	4	10	25
		1	5	11	9	21	47

Jabatan Struktural pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong :

- | | | | |
|---|-------------------|---|---------|
| 1 | Kepala Badan | : | 1 orang |
| 2 | Sekretaris | : | 1 orang |
| 3 | Kepala Sub Bagian | : | 3 orang |
| 4 | Kepala Bidang | : | 4 orang |
| 5 | Kepala Sub Bidang | : | 8 orang |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa komposisi pegawai yang menduduki jabatan structural sebanyak 17 orang, sedangkan jumlah keseluruhan pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Rejang Lebong berjumlah 26 orang yang terklarifikasi dalam tingkat pendidikan dan kepangkatan sebagai berikut :

Tabel 2.
Pegawai Menurut Pendidikan

N0	Pendidikan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah (Orang)
		ASN	Harlep	ASN	Harlep	
1	2	3	4	5	6	7
1	SLTA Sederajat		9		8	17
2	D3 Sederajat	1		2		3
3	S1	6	2	8	2	18
4	S2	4		5		9
Jumlah Keseluruhan		11	11	15	10	47

Tabel. 3
Pegawai Menurut Golongan

No	Klasifikasi	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	Laki-laki			6	5	11
2	Perempuan			8	7	15
Jumlah keseluruhan				14	12	26

Secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong sudah memiliki kualitas SDM yang cukup baik, hal ini dapat dilihat dari tabel 2, dengan kualitas SDM yang ada saat ini, Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Rejang Lebong tetap mampu melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik.

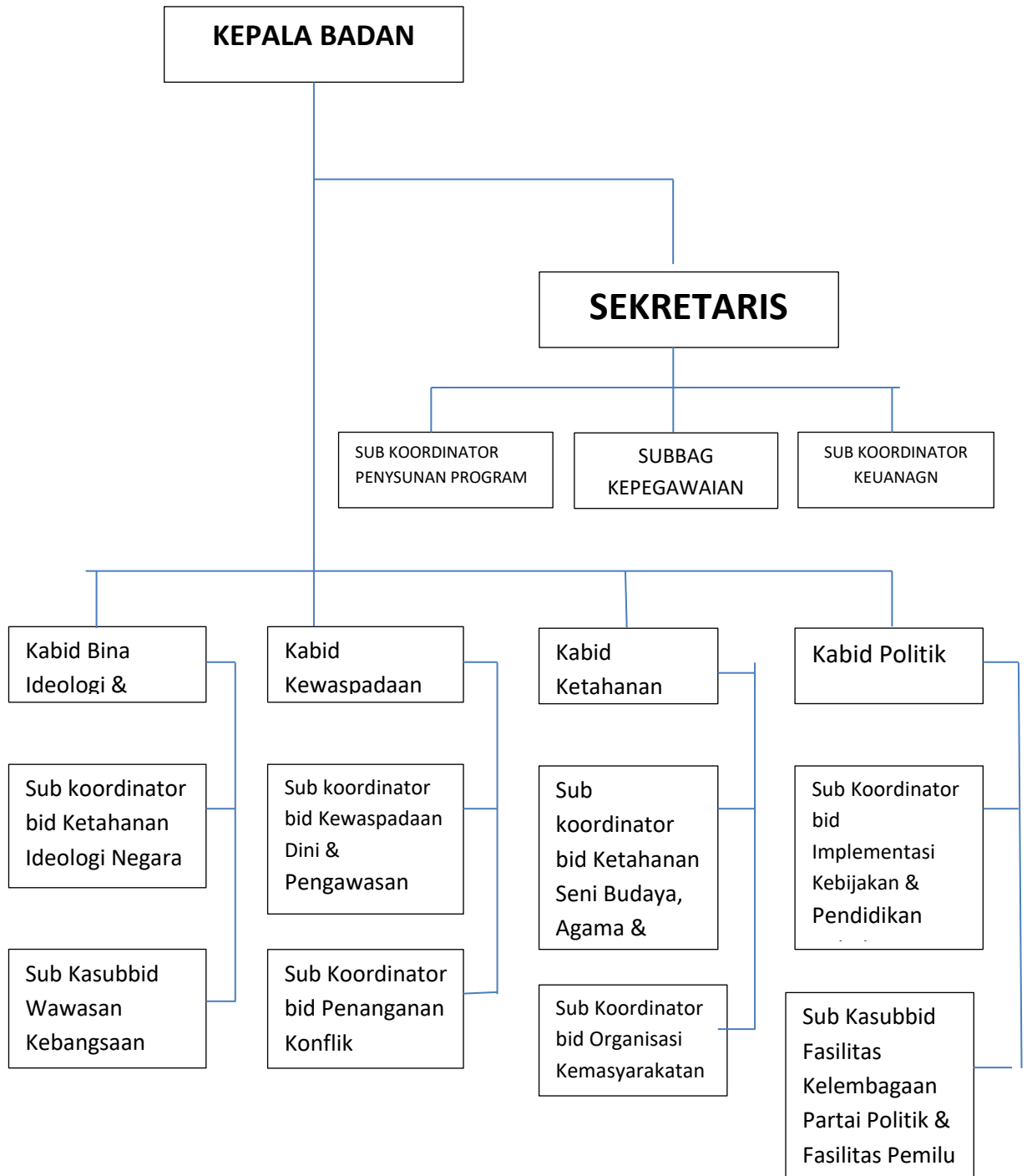
Tabel 4.
Komposisi Pegawai Per Bidang

No	Klasifikasi	Sekretariat		Ideologi		Politik		Ketahanan		Padnas	
		ASN	Harlep	ASN	Harlep	ASN	Harlep	ASN	Harlep	ASN	Harlep
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Laki-laki	2	4	2	2	4	2	1	2	2	1
2	Perempuan	7	3	2	1	0	2	4	2	2	2
	Jumlah	9	7	4	3	4	4	5	4	4	3

Dari tabel diatas, komposisi pegawai perbidang masih terdapat kekurangan pegawai hampir di semua bidang. Sedangkan pegawai yang ada saat ini ada beberapa orang yang tidak bisa di berdayakan karena sakit yang menahun, dan berapa orang lagi sudah hampir masuk usia purna bakti. Hal tersebut diharapkan menjadi masukan bagi perangkat daerah yang menangani tata laksana kepegawaian untuk mengisi kekurangan tersebut sesuai formasi dan tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan politik kabupaten Rejang Lebong.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Tahun 2022



1.4. Permasalahan Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik saat ini dikaitkan dengan Visi misi Kepala daerah dan strategis untuk mengatasinya.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek – aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

Selanjutnya berdasarkan analisis terhadap capaian kinerja periode sebelumnya (2016-2021), analisis permasalahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong, serta inventarisasi permasalahan aktual berkaitan dengan tugas utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut:

- a. Pesatnya pembangunan infrastruktur nasional dan regional, sehingga perlu penanganan keamanan daerah guna mendukung lajunya pembangunan tersebut;
- b. Masih kurangnya jiwa nasionalisme dilingkungan generasi muda;
- c. Belum optimalnya pelayanan terhadap masyarakat;
- d. Bermunculanya ajaran sesat berkedok agama;

Identifikasi penanganan ketahanan Bangsa penguatan hubungan antar lembaga, pendidikan Politik, Pengembangan wawasan kebangsaan dan dinamika politik, deteksi dini, serta pelayanan prima, keterkaitan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan politik dalam mengujudkan cita-cita reformasi tersebut maka kebijakan strategi yang diambil adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan wawasan kebangsaan, pembauran bangsa dan ketahanan bangsa yang di dasari falsafah negara terhadap berbagai elemen masyarakat.

2. Meningkatkan kualitas pendidikan Politik Masyarakat
3. Meningkatkan pembinaan dan penguatan terhadap partai politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga lainnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Indikator Kinerja Utama Organisasi

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong merupakan parameter serta acuan dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan. Sebagaimana tertuang dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesbangpol Kabupaten Rejang Lebong, sebagai berikut:

Tabel 2.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN REJANG LEBONG

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi perhitungan		
1.	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Skor	Nilai	Interprestasi dan Karakteristik Instansi
			> 90-100	AA	Sangat Memuaskan
			> 80-90	A	Memuaskan
			> 70-80	BB	Sangat Baik
			> 60-70	B	Baik
			>50-60	CC	Cukup (Memadai)
			>30-50	C	Kurang
		Persentase Inovasi yang terealisasi	>0-30	D	Sangat Kurang
2.	Meningkatkan kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat	Persentase Peningkatan Pemahaman terhadap kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat	$\frac{\text{Nilai Akhir} - \text{Nilai Awal}}{\text{Nilai Awal}} \times 100\%$		
3	Meningkatkan partisipasi Demokrasi Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	$\frac{\text{JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH}}{\text{JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP}} \times 100\%$		
4.	Meningkatkan Ketahanan ekonomi, Sosial dan Budaya Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Persentase konflik ekonomi, sosial dan budaya yang ditangani	$\frac{\text{JUMLAH KONFLIK YANG DITANGANI}}{\text{JUMLAH KONFLIK}} \times 100\%$		

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran pada tahun 2022 antara lain, penambahan anggaran kegiatan yang baru bisa dilaksanakan di akhir tahun. Kurangnya sarana dan prasarana, serta kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang menghambat dinamika organisasi. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut antara lain mengidentifikasi pelaksanaan kegiatan sampai selesai sebelum tutup tahun anggaran, meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan lembaga terkait, mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada, serta optimalisasi pembagian tugas seluruh staf yang ada.

2.2. Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022, diimplementasikan sebagaimana pada tabel 2.1 di atas, dituangkan dalam penetapan Kinerja (PK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022 sebagai Kontrak Kinerja antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong dengan Bupati Rejang Lebong sebagaimana disajikan pada tabel 2.2. Penetapan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong tersebut merupakan ikhtisar dari rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2022, sekaligus sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2022.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2022

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	B(70)
		Persentase Inovasi yang terealisasi	100%
2.	Meningkatkan kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat	Persentase Peningkatan Pemahaman terhadap kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat	10%
3	Meningkatkan kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat Meningkatkan partisipasi Demokrasi Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	77%
4.	Meningkatkan Ketahanan ekonomi, Sosial dan Budaya Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Persentase konflik ekonomi, sosial dan budaya yang ditangani	100%

Program		Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.539.904.890	
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	35.000.000,-	
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.119.679.165,-	
4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	45.000.000,-	
5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	35.000.000,-	
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	37.000.000,-	

2.3. Rencana Aksi

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Rejang Lebong dilaksanakan melalui beberapa program/kegiatan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah, dengan indikator Nilai SAKIP OPD dan Persentase Inovasi yang terealisasi didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Meningkatkan kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat dengan indikator Persentase Peningkatan Pemahaman terhadap kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat didukung oleh Program Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dan Sosialisasi FKUB.
3. Meningkatkan partisipasi Demokrasi Masyarakat dengan indikator Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum didukung oleh Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui pendidikan Politik dan pengembangan Etika serta budaya politik dan Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.
4. Meningkatkan Ketahanan ekonomi, Sosial dan Budaya dengan indikator Persentasi konflik ekonomi,social dan budaya yang ditangani didukung oleh Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya dan Program Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik social

Penjelasan diatas tercakup dalam tabel rencana Aksi berikut :

**RENCANA AKSI/PENCAPAIAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2022**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Target Kinerja	Rencana /Target Capaian			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD Persentase Inovasi yang terealisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	B 100%	100 %		B	
2	Meningkatkan kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat	Persentase Peningkatan Pemahaman terhadap kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	10%		10%		
3	Meningkatkan partisipasi Demokrasi Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui pendidikan Politik dan pengembangan Etika serta budaya politik Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	77%			77%	
4	Meningkatkan Ketahanan ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase konflik ekonomi, sosial dan budaya yang ditangani	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	100%			100%	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong selaku pengembang amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentan Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Upaya untuk Meningkatkan akuntabilitas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong juga melakukan Reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

3.1.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.1. Capaian IKU sasaran Strategis Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks/ Predikat	B (70)	B (66,43)	94,90%
		Persentase Inovasi yang terealisasi	%	100% (1Inovasi)	100% (1Inovasi)	100%
2	Meningkatkan kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat	Persentase Peningkatan Pemahaman terhadap kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat	%	10%	0,49%	4,90%
3	Meningkatkan partisipasi Demokrasi Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	%	77%	78,66%	102,16%
4	Meningkatkan Ketahanan ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase konflik ekonomi, sosial dan budaya yang ditangani	%	100%	100%	100%

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi Indikator sasaran. Pencapaian kinerja strategis, program/kegiatan didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase pencapaian rencana dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana yang semakin baik.

Perhitungan prosentase pencapaian target perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi:

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah capaian kinerja, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}-\text{Target}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong, target sudah ditetapkan dari sasaran program dan indicator kinerja dengan realisasi kinerja yang sudah dicapai yaitu :

1. - Nilai SAKIP OPD, dari target B Realisasi B

$$\text{Dengan perhitungan rumus 1 yaitu} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 = \frac{66,43}{70} \times 100 = \mathbf{94,90 \%}$$

Dari target B (70) diperoleh Nilai **66,43** dengan perincian sebagai berikut :

- Perencanaan Kinerja = 22,98
- Pengukuran Kinerja = 18, 17
- Pelaporan Kinerja = 10,78
- Evaluasi Akuntabilitas KI = 14,50

Pencapaian ini diperoleh dari hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021 yang mana point nya sebagai berikut :

- Mempublikasikan Dokumen Perencanaan seperti Renstra, IKU dan PK Melalui web Site
- Menyusun Dokumen Rencana Kerja dan anggaran mengacu kepada dokumen Renstra dan IKU
- Melakukan monitoring terhadap pencapaian target Renstra per 6 bulan

- Me revidir Renstra dan Indikator Utama secara berkala agar hasilnya relevan dengan kondisi saat ini
- Memperbaiki Dokumen Perjanjian Kinerja agar bisa dimanfaatkan dalam penyusunan sampai kepada tingkat eselon III dan IV
- Memperbaiki Dokumen Perjanjian Kinerja agar bisa dimanfaatkan dalam penyusunan sampai kepada tingkat eselon III dan IV
- Melakukan Pengukuran Kinerja secara Berjenjang mulai dari eselon III hingga Staf
- Melengkapi mekanisme pengumpulan data dengan pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang Up To Date
- Membuat Laporan secara bulanan melalui laporan fisik dan keuangan dan melaporkan Rencana Aksi secara triwulan
- Menyusun Laporan Kinerja Individu Eselon II, Eselon III dan Eselon IV sebagai dasar pengukuran Capaian Kinerja
- Melakukan Pengukuran tingkat efisiensi penggunaan sumber daya
- Membuat laporan secara bulanan melalui laporan fisik dan keuangan.
- Melengkapi informasi kinerja dalam laporan kinerja dengan SOP
- Melakukan Pemantauan Rencana Aksi secara Berkala dalam rangka mengendalikan kinerja

- Persentase Inovasi yang terealisasi dari target 100% realisasi 100%

Inovasi yang dilakukan yaitu tersedianya :

“Pojok Layanan Informasi dan konsultasi Surat Keterangan Terdaftar ORMAS, ORSOS, dan LSM.”

Dengan tujuan agar bagi masyarakat yang ingin mencari informasi mengenai Ormas, Orsos dan LSM dapat langsung ke pojok layanan tersebut yang terdapat di kantor Kesbangpol Kabupaten Rejang Lebong.

Dengan merealisasikan satu Inovasi tersebut maka target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

2. Persentase Peningkatan Pemahaman terhadap kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat, dari target 10 % realisasinya 0,49 %

diperoleh dari hasil pengisian angket tentang Pemahaman terhadap kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat sebelum dan setelah diberi pemahaman singkat tentang hal tersebut terhadap perwakilan beberapa agama dan suku yang berbeda di kabupaten Rejang Lebong.

Dari kegiatan tersebut diperoleh nilai Awal dan Nilai Akhir sebagai berikut:

Nilai Awal Pemahaman = 820 point

Nilai Akhir Pemahaman= 824 point

Jadi untuk mengetahui persentase peningkatan pemahaman adalah sebagai berikut **Nilai Akhir-Nilai Awal/Nilai Awal x 100**

$$824-820/820 \times 100 = 0,49 \%$$

Target ini dianggap tidak berhasil. Hal ini dikarenakan memang tingkat pemahaman masyarakat tentang toleransi dalam kehidupan masyarakat masih kurang atau jauh dari target yang diharapkan, bertolak dari hal tersebut sudah seharusnya diadakan sosialisasi tentang Pemahaman terhadap kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat.

Pada Tahun 2022 belum ada anggaran untuk menangani hal tersebut, semoga pada tahun yang akan datang tersedia anggaran untuk melaksanakan sosialisasi tentang hal tersebut. Sehingga target yang diharapkan dapat tercapai.

Disini juga dapat kami jelaskan bahwa indikator Persentase Peningkatan Pemahaman terhadap kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat ini di dukung oleh **1 program yang realisasi kinerjanya mencapai 100% yaitu, Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan**, didalam progam tersebut terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, keluaran sub kegiatan adalah sosialisasi wawasan kebangsaan dan sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental. Namun dalam kegiatan tersebut idak ada pengukuran untuk perhitungan capaian Indikator kinerja seperti tersebut diatas.

3. Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum target 77% dengan Realisasi 78,66%

diperoleh dari perbandingan antara jumlah pemilih tetap di kabupaten rejang Lebong dengan pengguna hak pilih pada saat pemilu dan pilkada.

Jumlah Pemilih Tetap di Kabupaten Rejang Lebong = **203 336 Jiwa**

Jumlah Penggunaan Hak Pilih Kabupaten Rejang Lebong dalam Pilpres 2019 dan Pilkada 2020 = **159.937 Jiwa**

Dari Data tersebut diperoleh Persentase Masyarakat dalam Pemilu

$$\frac{\text{Jumlah Penggunaan Hak Pilih} \times 100}{\text{Jumlah Pemilih Tetap}} = \frac{159.937 \times 100}{203.336} = 78,66\%$$

Dari Target yang ditetapkan sebesar 77 % dengan realisasi 78, 66%. Hal ini cukup berhasil di karenakan besarnya antusias masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilu ataupun Pilkada.

4. Persentase turunnya konflik ekonomi,sosial dan budaya target 100% dengan Realisasi 100 %

Realisasi diperoleh sesuai target karena pada tahun 2022 tidak adanya konflik yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong. Hal tersebut karena kesadaran masyarakat akan penting nya menjaga keamanan dan ketertiban sudah cukup tinggi.

3.1.2. Membandingkan Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.2. Capaian IKU sasaran Program Tahun 2021 s/d Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2022
1	2	3	6	7
			-	
1	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	B (66,05)	B (66,43)
		Persentase Inovasi yang terealisasi		100%
2	Meningkatkan kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat	Persentase Peningkatan Pemahaman terhadap kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat	-	0,49%
3	Meningkatkan partisipasi Demokrasi Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	78,66%	78,66%
4	Meningkatkan Ketahanan ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase konflik ekonomi, sosial dan budaya yang ditangani	100 %	100%

Tabel 3.2 diatas adalah Uraian dari Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2022, Disini Kami tidak menampilkan Tabel 2021 karena Indikator Kinerja Utama Pada Tahun 2021 berbeda dengan Indikator tahun 2022. Namun dapat dijelaskan kalau secara umum capaian kinerja pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang lebih baik. Seperti :

- Nilai SAKIP pada Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar **0,5 %** di banding tahun 2021, yang mana pada tahun 2021 Nilai AKIP Badan Kesbangpol adalah sebesar **66,05** sedangkan pada tahun 2022 mengalami kenaikan yaitu **66,43**. ini artinya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah pada tahun 2022 lebih baik dari sebelumnya.

- Persentase Inovasi yang terealisasi hanya dapat dinilai pada Tahun 2022, pada tahun 2021 belum ada Indikator tersebut. Realisasi capaian sebesar **100%**.
- Persentase Peningkatan Pemahaman terhadap kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat pada Tahun 2022 hanya terealisasi sebesar **0,49%** dari target **10%** dan tahun sebelumnya tidak bisa dinilai karena tidak ada indikator tersebut pada tahun 2021.
- Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum Pada tahun 2022 terealisasi sebesar **78,66%** dari target **77%**, begitupun tahun 2021 dengan Persentase yang sama karena Pemilu telah dilaksanakan pada Tahun 2019 dengan persentase tersebut diatas.
- Persentase konflik ekonomi, sosial dan budaya yang ditangani Pada Tahun 2022 Terealisasi **100%** karena tidak adanya konflik yang terjadi begitupun pada Tahun sebelumnya walaupun tidak ada indikator tersebut pada tahun sebelumnya.

3.1.3. Membandingkan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

Tabel 3.3. Perbandingan capaian IKU Sasaran Program Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Program	Realisasi Kinerja tahun 2022	Target Renstra tahun 2022	Target Renstra Tahun terakhir
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	B (66,43)	B(70)	B
		Persentase Inovasi yang terealisasi		100%	100%	100%
	Meningkatkan kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat	Persentase Peningkatan Pemahaman terhadap kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	0,49%	10%	10%
	Meningkatkan partisipasi Demokrasi Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	78,66%	77%	85%
			Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan			
	Meningkatkan Ketahanan ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase konflik ekonomi, sosial dan budaya yang ditangani	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	100%	100%	100%
			Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial			

Dari tabel 3.3 dapat dijelaskan bahwa :

1. Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2022 dari Target B (70) dengan Realisasi B(66,43) sedangkan pada Tahun 2021 realiasi B (66,05) Dari target kinerja pada akhir periode Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah mencapai **160,95%**.
2. Persentase Peningkatan Pemahaman terhadap kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat Pada Tahun 2022 realisasi sebesar 0,49 % dari Target 10 % sedangkan pada tahun 2021 adalah 0% , Dari target kinerja pada akhir periode Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik baru mencapai **10,49%**
3. Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum Tahun 2022 dari target 77% dapat terealisasi sebesar 78,66% melebihi target yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2022, begitupun pada tahun 2021 sehingga Dari target kinerja pada akhir periode Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah mencapai **185,08%**
4. Persentase konflik ekonomi,sosial dan budaya yang ditangani pada Tahun 2022 terealisasi 100% dari target 100 % karena tidak ada konflik yang terjadi pada tahun 2021 maupun tahun 2022, sehingga Dari target kinerja pada akhir periode Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah mencapai **200%**

3.1.4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Tabel 3.4. Perbandingan capaian IKU Sasaran Program Tahun 2022 dengan Target Standar nasional

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Program	Realisasi Kinerja tahun 2022	Target/Standar Nasional
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	B	>B
		Persentase Inovasi yang terealisasi		100%	-
2	Meningkatkan kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat	Persentase Peningkatan Pemahaman terhadap kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	10,05%	-
3	Meningkatkan partisipasi Demokrasi Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	78,66%	-
			Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan		
4	Meningkatkan Ketahanan ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase konflik ekonomi, sosial dan budaya yang ditangani	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	100%	-
			Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial		

Dari Tabel 3.4 dapat dijelaskan bahwa Realisasi capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong hanya satu Indikator yang memiliki target/standar Nasional, yaitu Nilai SAKIP dengan Target skor >B sedangkan capaian untuk Kesbangpol baru mencapai B jadi belum mencapai standar Nasional.

sedangkan Indikator lainnya **belum** mempunyai standar nasional untuk dijadikan perbandingan dalam capaian kinerja.

3.1.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Untuk dapat menentukan apakah realisasi kinerja yang telah dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong dapat dikategorikan berhasil atau gagal digunakan perhitungan dengan rumus yang telah ditetapkan sebagai berikut: Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut

Rumus 1

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian	=	Realisasi	X	100 %
		Rencana		

1. Rumus 2

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

Persentase pencapaian rencana tingkat capaian	=	Rencana-Realisasi	x	100%
		Rencana		

Selanjutnya, untuk melaksanakan penilaian capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong, ditetapkan penilaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut:

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Dengan menggunakan rumus dan juga parameter yang telah ditentukan, selanjutnya dapat dilakukan analisis terhadap keberhasilan atau kegagalan pada masing-masing indikator kinerja per misi yang ingin dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2022.

Pada tahun 2022, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

3.5. Tabel Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Predikat
1	2	3	4		6	7	7
1	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks/ Predikat	B(70)	B (66,43)	94,90%	tinggi
		Persentase Inovasi yang terealisasi	%	100%	100%	100%	Sangat tinggi
2	Meningkatkan kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat	Persentase Peningkatan Pemahaman terhadap kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat	%	10%	0,49%	4,90%	Sangat rendah
3	Meningkatkan partisipasi Demokrasi Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	%	77%	78,66%	102,16 %	Sangat tinggi
4	Meningkatkan Ketahanan ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase konflik ekonomi, sosial dan budaya yang ditangani	%	100%	100%	100%	Sangat tinggi

Analisis penyebab keberhasilan kinerja pada sasaran strategis adalah :

1. **Nilai SAKIP OPD** dengan Predikat **tinggi**, karena didukung oleh Sistem pelaporan cepat dan tanggap melalui media sosial tentang perkembangan situasi dan kondisi daerah serta pelaporan yang berkaitan dengan tugas dan urusan Kesatuan Bangsa dan politik di Wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

Pencapaian ini juga diperoleh dari melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Mempublikasikan Dokumen Perencanaan seperti Renstra, IKU dan PK Melalui web Site
- Menyusun Dokumen Rencana Kerja dan anggaran mengacu kepada dokumen Renstra dan IKU
- Melakukan monitoring terhadap pencapaian target Renstra per 6 bulan
- Me reuiu Renstra dan Indikator Utama secara berkala agar hasilnya relevan dengan kondisi saat ini
- Memperbaiki Dokumen Perjanjian Kinerja agar bisa dimanfaatkan dalam penyusunan sampai kepada tingkat eselon III dan IV
- Memperbaiki Dokumen Perjanjian Kinerja agar bisa dimanfaatkan dalam penyusunan sampai kepada tingkat eselon III dan IV
- Melakukan Pengukuran Kinerja secara Berjenjang mulai dari eselon III hingga Staf
- Melengkapi mekanisme pengumpulan data dengan pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang Up To Date
- Membuat Laporan secara bulanan melalui laporan fisik dan keuangan dan melaporkan Rencana Aksi secara triwulan
- Menyusun Laporan Kinerja Individu Eselon II, Eselon III dan Eselon IV sebagai dasar pengukuran Capaian Kinerja
- Melakukan Pengukuran tingkat efisiensi penggunaan sumber daya
- Membuat laporan secara bulanan melalui laporan fisik dan keuangan.
- Melengkapi informasi kinerja dalam laporan kinerja dengan SOP
- Melakukan Pemantauan Rencana Aksi secara Berkala dalam rangka mengendalikan kinerja

2. **Persentase Peningkatan Pemahaman terhadap kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat** predikat **sangat rendah** dengan capaian 0,49%

Target ini dianggap tidak berhasil, ini dikarenakan :

- tingkat pemahaman masyarakat tentang toleransi dalam kehidupan masyarakat masih kurang atau jauh dari target yang diharapkan,
- belum ada anggaran untuk menangani hal tersebut.

bertolak dari hal tersebut maka solusinya adalah :

- * Menganggarkan Anggaran untuk Kegiatan FKUB
- * Mengadakan Sosialisasi tentang Pemahaman terhadap kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat
- * Pembinaan pembauran bangsa dan kerukunan hidup beragama melalui fasilitasi terhadap ormas yang bergerak dibidangnya seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
- * Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat khususnya kalangan pelajar dan generasi muda serta berbagai etnis dan paguyuban yang ada di Kabupaten Pati dalam rangka memberikan pemahaman tentang nilai-nilai wawasan kebangsaan dan penguatan ideologi Pancasila guna membangun kesadaran bela negara dan menciptakan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat

Dokumentasi Tentang Pemahaman masyarakat tentang toleransi dalam kehidupan masyarakat



3. **Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum** peredikat **sangat tinggi** dengan capaian **102%** dari Target **77 %** realisasi **78,66%** Keberhasilan ini tidak lepas dari :

- Sudah Tingginya Kesadaran Masyarakat akan pentingnya partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pemilu ataupun pilkada.
- Didukung oleh anggaran yang memadai

Dokumentasi Verifikasi Bantuan Partai Politik



Solusi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan persentase partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum antara lain :

- Melaksanakan sosialisasi pendidikan politik bagi generasi muda dan perempuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu (Pilkada, Pileg Pilpres)
- Meningkatkan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik.
- Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan KPU Rejang Lebong dan Instansi terkait.

4. **Persentase konflik ekonomi, sosial dan budaya yang ditangani** peredikat **sangat tinggi** dengan capaian **100%** dari target **100 %** realisasi **100%** Keberhasilan ini tidak lepas dari :

- Terjalannya Koordinasi dan Konsolidasi antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong dengan Tokoh Masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, alim ulama dan ormas/LSM dalam melakukan deteksi dini dan pencegahan terkait berbagai permasalahan khususnya masalah konflik social budaya yang dapat mengganggu kondusifitas wilayah.

Dokumentasi Rapat Mengatasi Masalah Konflik



Namun untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi maka perlu dilakukan solusi/hal-hal berikut :

- Memberdayakan masyarakat dalam rangka meningkatkan kepekaan dan kewaspadaan dalam menyikapi munculnya permasalahan situasi kondisi daerah.
- Melaksanakan koordinasi intelijen daerah secara intensif
- Melaksanakan kegiatan pemantauan secara intensif terhadap kemungkinan aksi terorisme serta kegiatan kelompok radikal lainnya.
- Meningkatkan koordinasi aparat keamanan.

3.1.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi sumber daya manusia dan sumber daya anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa mayoritas dari 4 sasaran strategis dan 6 Program, menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat bagus.

Penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien dalam mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran yaitu dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsi setiap pegawai dalam mendukung pencapaian program dan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan sehingga mencapai target indikator kinerja sasaran

1. Meningkatnya Kualitas Kinerja Dan Pelayanan Perangkat

Daerah, yang terdiri dari 2 Indikator, yaitu Nilai SAKIP OPD dan Persentase Inovasi yang terealisasi, Pencapaian sasaran kinerja ini merupakan tanggung jawab Sekretariat Badan Keastuan Bangsa dan politik karena didukung oleh Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, terdiri dari 7 Personil yaitu : 1 orang Sekretaris, 1 orang Sub. Bag Perencanaan dan Program, 1 orang Sub. Bag Keuangan dan 1 orang Sub. Bag Kepegawaian serta 3 orang staf.

2. Meningkatkan Kerukunan Dan Toleransi Dalam Kehidupan

Masyarakat dengan indikator Persentase Peningkatan Pemahaman terhadap kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat, Pencapaian sasaran kinerja ini merupakan tanggung jawab Bidang Ideologi Pancasila dengan didukung program Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan, terdiri dari 4 personil, yaitu : 1 orang Kepala Bidang, 2 Orang Kasubbid dan 1 orang staf

3. Meningkatkan partisipasi Demokrasi Masyarakat dengan indikator Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, Pencapaian sasaran ini didukung oleh 2 program, yaitu

1. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika

serta budaya politik, dalam program ini terdiri dari 4 personil yaitu : 1 orang Kabid, 2 prang Kasubbid dan 1 orang staf.

2. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, dalam program ini terdiri dari 5 personil yaitu : 1 orang Kabid, 2 prang Kasubbid dan 12 orang staf.

4. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya dengan indikator Persentase konflik ekonomi, sosial dan budaya yang ditangani, dalam pencapaian sasaran ini didukung 2 program, yaitu:

1. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, dengan jumlah personil sebanyak 5 orang, terdiri dari 1 orang Kabid, 2 orang Kasubbid dan 2 orang staf.
2. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial dengan jumlah personil sebanyak 4 orang, terdiri dari 1 orang Kabid, 2 orang Kasubbid dan 1 orang staf.

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel Efisiensi penggunaan Anggaran

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Program	Realisasi kinerja Tahun 2022	Anggaran Rp.	Realisasi anggaran Rp.	Tingkat Efisiensi %
1	2	3	4	5	6	6	6
1	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD Persentase Inovasi yang terealisasi	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	97,37%	3.133.088.677	3.004.822.294	4,09 %
2	Meningkatkan kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat	Persentase Peningkatan Pemahaman terhadap kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100%	35.000.000	34.209.500-	2,26%
3	Meningkatkan partisipasi Demokrasi Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	100%	1.102.619.165	1.094.686.602-	0,72%
4	Meningkatkan Ketahanan ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase konflik ekonomi, sosial dan budaya yang ditangani	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	100% 100% 100%	27.866.000 28.510.000 192.700.000	23.677.600 25.150.800- 148.640.000-	15,03% 11,78% 22,86%
Jumlah					4.519.783.824	4.331.186.796	4,17%

Berdasarkan hasil evaluasi masing-masing indikator ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya dapat dilakukan juga analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya/sumber anggaran.

Untuk mengetahui tingkat Efisiensi penyerapan anggaran dapat digunakan rumus sbb:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Target Anggaran} - \text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target anggaran}} \times 100\%$$

- a. Apabila hasil dari perhitungan menunjukkan presentase diatas 100%, artinya tidak efisien.
- b. Apabila dari perhitungan tersebut hasilnya 90% - sampai 100%, dapat diartikan kurang efisien
- c. Apabila hasil dari perhitungan tersebut diangka 80% sampai 90%, artinya cukup efisien
- d. Apabila hasil perhitungan tersebut diangka 60% sampai 80%, artinya efisien.
- e. Apabila perbandingan tersebut menghasilkan angka dibawah 60%, dapat diartikan sangat efisien

Dari tabel diatas kita bisa melihat bahwa secara umum tingkat efisiensi penggunaan anggaran di Badan Kesbangpol Kab. Banjar sudah sangat baik, hampir semuanya mempunyai nilai efisiensi walaupun nilainya bervariasi.

Perencanaan sebagai bentuk komitmen dan dukungan atas keberhasilan pelaksanaan kegiatannya. Adapun untuk pelaksanaan program efisiensi penggunaan anggaran terbesar sampai terkecil ada pada : • Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya dengan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 22,86 persen • Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 15,03 persen. • Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan tingkat efisiensi

penggunaan anggaran sebesar 11,78 persen • Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan dengan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 2,26 persen. • Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik dengan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 0,72 persen

3.1.7. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis kinerja didasarkan atas hasil pengukuran kinerja pelaksanaan program/kegiatan dalam suatu sasaran strategis yang diharapkan. Sasaran kinerja strategis tidak dapat dicapai jika tidak didukung dengan program dan kegiatan yang benar” mendukung pencapaian sasaran tersebut. Secara rata-rata, program/kegiatan telah dilaksanakan sepenuhnya dengan capaian kurang dari 100% , Capaian ini bukan berarti tidak mencapai target namun bisa diartikan bahwa capaian realisasi program diiringi dengan penghematan anggaran untuk mencapai target maksimal tanpa mengurangi esensi target capaian indikator kinerja. Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang ingin di wujudkan, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Rejang Lebong menetapkan program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Sasaran strategis I

“Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah”

Sasaran tersebut diukur dengan indikator outcome Nilai SAKIP OPD dan Persentase Inovasi yang terealisasi, dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	Nilai SAKIP OPD	B (70)	B (66,43)	94,90%
1	Persentase Inovasi yang terealisasi	100%	100%	100%

Tabel diatas menunjukan bahwa indikator kinerja ini sudah hampir mencapai target yang ditetapkan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Rejang Lebong untuk pemenuhan target kinerja sasaran I didukung oleh program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan total anggaran sebesar Rp. 3.133.088.677,-

Kegiatan dalam Program Ini adalah :

- Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang terdiri dari 2 Sub kegiatan yaitu :
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan total anggaran Rp. 9.987.400,- dengan target dan indikator kinerja yaitu Jumlah dokumen Perangkat Daerah 3 Dokumen, realisasi Rp. 9.979.000,- dan Realisasi Kinerja 3 Dokumen.
 2. Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Dengan total Anggaran Rp. 12.784.000,- target dari indikator kinerja yaitu Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10 dokumen. Realisasi anggaran Rp. 7.220.000,- dan Realisasi Kinerja 10 Dokumen.
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Terdiri dari 2 sub kegiatan :
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ,jumlah anggaran Rp. 2.641.205.157. dengan indikator kinerja Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN target sebanyak 350 Orang realisasi anggaran 2.601.830.824,-.
 2. Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN, pagu anggaran sebesar Rp. 166.975.000 dengan indikator kinerja jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, target 12 Dokumen realisasi anggaran Rp. 157.675.000,- realisasi kinerja 100% yaitu 12 Dokumen.
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
Terdiri dari 7 sub kegiatan :
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, jumlah anggaran Rp. 5.500.000,- dengan indikator

kinerja jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan, target 1 Paket, realisasi anggaran Rp. 5.333.000,- realisasi kinerja 100% yaitu 1 Paket.

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Jumlah anggaran Rp. 1.962.520,- dengan indikator kinerja jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan, target 1 Paket, realisasi anggaran Rp. 1.962.520,- realisasi kinerja 100%
 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, anggaran Rp. 2.388.800,- dengan indikator kinerja jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan, target 1 Paket, realisasi anggaran 0, ini disebabkan kode rekening pada sub kegiatan tersebut salah jadi tidak bisa direalisasikan.
 4. Penyedia Bahan Logistik Kantor, anggaran Rp. 44.987.100,- dengan indikator kinerja jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan, target 1 Paket, realisasi anggaran Rp. 44.883.000,- realisasi kinerja 100%
 5. Penyedia Barang Cetak dan Pengadaan, anggaran Rp. 19.997.000,- dengan indikator kinerja jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan, target 1 Paket. Realisasi anggaran Rp. 19.997.000,- realisasi kinerja 100%
 6. Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, anggaran Rp. 30.000.000,- dengan indikator kinerja jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan, target 1 paket, realisasi anggaran Rp. 30.000.000,- Realisasi Kinerja 100%
 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, anggaran Rp. 98.698.000,- dengan indikator jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd, target 12 Laporan, realisasi anggaran Rp. 56.092.000,-
- Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan :

1. Penyedia Jasa Surat Menyurat, jumlah anggaran Rp. 10.000.000,- dengan indikator kinerja jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat, target 12 laporan, realisasi anggaran Rp. 10.000.000,- dan realisasi kinerja 100%
2. Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, jumlah anggaran 39.892.000,- dengan indikator jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan, target 12 Laporan, realisasi anggaran Rp. 19.940.450,- realisasi kinerja 100%
3. Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, jumlah anggaran Rp. 8.820.000,- dengan indikator jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan, target 12 Laporan, realisasi anggaran Rp. 5.700.000,-

➤ **Pemeliharaan Barang Milik Daerah**

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan , yaitu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan jumlah anggaran Rp. 39.908.700,- dengan indikator jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak nya, target 10 Kendaraan . Realisasi anggaran Rp. 34.209.500,- realisasi kinerja 100%.

b. Sasaran strategis 2

“Meningkatnya kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat”

Sasaran tersebut diukur dengan indikator outcome Persentase Peningkatan pemahaman terhadap kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat, dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1.	Persentase Peningkatan pemahaman terhadap kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat	10 %	0,49%	4,88%

Tabel diatas menunjukkan bahwa indikator kinerja tidak mencapai target yang ditetapkan. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakuka untuk mencapai target antara lain, mengadakan Sosialisasi tentang wawasan kebangsaan, sosialisasi G RMN dan Pengisian angket terhadap beberapa tokoh masyarakat tentang pemahaman terhadap kerukunan hidup bermasyarakat, namun hasil dari semua itu belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Dan untuk pemenuhan target kinerja sasaran 2 didukung oleh program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 34.320.000,-.

Kegiatan dalam program ini adalah : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan 2 sub kegiatan :

- 1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, jumlah anggaran pada sub kegiatan ini Rp. 17.500.000,- dengan indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan, sedangkan targetnya adalah 50 orang, realisasi anggaran sebesar Rp. 17.160.000,- realisasi kinerja 100% yaitu 50 orang.
- 2) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan jumlah anggaran pada sub kegiatan ini Rp. 17.500.000,- dengan indikator jumlah orang yang mengikuti koordinasi dibid.ideologi wawasan kebangsaan,bela negara,karakter bangsa,pembauran kebangsaan,bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan, sedangkan targetnya adalah 50 orang, realisasi anggaran sebesar Rp. 17.160.000,- realisasi kinerja 100% yaitu 50 orang.

c. Sasaran strategis 3

“Meningkatnya Partisipasi Demokrasi Masyarakat”

Sasaran tersebut diukur dengan indikator outcome Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1.	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	77 %	78,66%	102%

Tabel diatas menunjukkan bahwa indikator kinerja ini sudah mencapai target yang ditetapkan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong untuk pemenuhan target kinerja sasaran I didukung oleh program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik dengan jumlah anggaran Rp. 1.102.619.165,- realisasi anggaran Rp. 1.094.686.602,- dan program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan dengan jumlah anggaran Rp. 27.866.000,- realisasi Rp.23.677.800,-

Kegiatan yang dilakukan pada program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik adalah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, dengan 2 Sub Kegiatan :

- 1) Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah jumlah anggaran Rp. 1.077.219.165,- dengan indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi

Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, target 10 parpol, realisasi anggaran Rp. 1.075.719.165,- realisasi kinerja 100%.

- 2) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah jumlah anggaran Rp. **25.400.000,-** dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, target 15 laporan, realisasi anggaran Rp. 18.967.437,- realiasi kinerja 100%

Kegiatan yang dilakukan pada program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan adalah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, jumlah anggaran Rp. 27.866.000,- dengan indikator Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan dibidang pendaftaran ormas,pemberdayaan ormas,evaluasi dan mediasi sengketa ormas,pengawasan ormas dan ormas asing didaerah , target 30 Ormas, realisasi anggaran Rp. 23.677.800,- realisasi kinerja 100%

a. Sasaran strategis 4

“Meningkatnya ketahanan Ekonomi, sosial dan budaya”

Sasaran tersebut diukur dengan indikator outcome Persentase Konflik ekonomi, sosial dan budaya yang ditangani, dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1.	Persentase Konflik ekonomi, sosial dan budaya yang ditangani	100 %	100%	100%

Sasaran Strategis 4, Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya dilaksanakan melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya jumlah anggaran Rp. 28.510.000,- realisasi anggaran Rp. 25.185.800,- dan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial jumlah anggaran Rp. 32.000.000,- realisasi Rp. 31.670.000,-

Kegiatan yang dilakuakn pada program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya adalah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah , jumlah anggaran pada sub kegiatan ini Rp. 28.510.000,- dengan indikator jumlah orang yang mengikuti koordinasi dibidang ketahanan ekonomi,sosial dan budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan nakotika,fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah, target 90 orang, Realisasi anggaran Rp. 25.185.800,-

Dan Kegiatan yang dilakukan pada program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial adalah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, dengan 2 sub kegiatan :

- 1) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, jumlah anggaran Rp. 32.000.000,- dengan indikator jumlah orang yang mengikuti koordinasi dibidang kewaspadaan dini,kerjasama intelijen, pemantauan orang

asing, tenaga kerja asing, kewaspadaan perbatasan antar negara fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah, target 60 orang, realisasi anggaran Rp. 31.670.000,-

- 2) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, jumlah anggaran Rp. 160.700.000,- dengan indikator 'Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, target 3 dokumen, realisasi anggaran Rp. 116.970.000,-

3.2. Realisasi Anggaran.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Rejang Lebong, pada Tahun Anggaran 2022, didukung dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022 sebesar **Rp. 3.849.064.664.** Dengan rincian sbb:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Belanja Pegawai | Rp. 2.153.903.779,- |
| 2. Belanja Barang dan Jasa | Rp. 678.441.720,- |
| 3. Belanja Hiba | Rp. 1.016.719.165,- |

Setelah adanya perubahan APBD Kabupaten Rejang Lebong pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong menjadi sebesar **Rp. 4.519.783.842.** Dengan rincian sbb :

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Belanja Pegawai | Rp. 2.729.330.157,- |
| 2. Belanja Barang dan Jasa | Rp. 779.734.520,- |
| 3. Belanja Hiba | Rp. 1.016.719.165,- |

Dengan total realisasi sebesar **Rp. 4.331.186.796,- (95,83)** adapun rinciannya sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Belanja Pegawai | Rp. 2.759.505.824,- (101,11%) |
| 2. Belanja Barang dan Jasa | Rp. 554.961.807,- (71,73%) |
| 3. Belanja Hiba | Rp. 1.016.719.165,- (100%) |

Adapun realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.6. Realisasi Penggunaan Anggaran

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Program	Realisasi kinerja Tahun 2022	Anggaran Rp.	Realisasi anggaran Rp.	Anggaran yang tidak terealisasi %
1	Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	3 Nilai SAKIP OPD Persentase Inovasi yang terealisasi	4 Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	5 94,90% 100%	6 3.133.088.677	6 3.004.822.294	6 4,09 %
	Meningkatkan kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat	Persentase Peningkatan Pemahaman terhadap kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat	Program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	0,49%	35.000.000	34.209.500-	2,26%
	Meningkatkan partisipasi Demokrasi Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	102,16%	1.102.619.165	1.094.686.602	0,72%
	Meningkatkan Ketahanan ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase konflik ekonomi, sosial dan budaya yang ditangani	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	100%	27.866.000 28.510.000 192.700.000	23.677.600 25.150.800- 148.640.000-	15,03% 11,78% 22,86%
Jumlah					4.519.783.824	4.331.186.796	4,17%

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten rejang Lebong pada tahun 2022 ada sebanyak 6 Program dengan 10 kegiatan dan 22 Sub Kegiatan. Semua program dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik hanya saja anggaran tidak terserap 100% karena hampir semua Program realisasinya dimulai pada **Akhir TW I** dan hampir semua program juga mengalami rasionalisasi yang mana anggaran yang telah dirasionalisasi masuk ke dalam APBD Perubahan bisa direalisasi pada akhir TW 4 dengan kata lain waktu yang sangat singkat, seperti :

- a. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik social dari jumlah anggaran sebesar Rp. 160.700.000,- realisasi Rp. 116. 970.000,- masih ada sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 43.730.000,- ini menunjukkan tingkat efisiensi yang cukup baik merealisasikan yang benar-benar dibutuhkan, namun hal tersebut tidak mempengaruhi hasil kinerja pada IKU yang ada.
- b. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan jumlah anggaran Rp. 27.866.000,- realisasi Rp. 23.677.600,- masih ada sisa anggaran sebesar Rp. 4.188.400,- ini juga karena efisiensi yg cukup baik, namun tidak mempengaruhi hasil kinerja IKU.

Analisis atas efisiensi sumber daya anggaran sebagai berikut :

1. Kegiatan masih terdapat sisa anggaran dikarenakan penggunaan sesuai dengan kebutuhan yang ada, seperti masih terdapat sisa honorarium narasumber, sisa belanja makan minum dan sisa penggunaan biaya perjalanan dinas.
2. Dalam mengalokasikan anggaran untu program dan kegiatan berdasarkan prioritas secara efektif, efisien dan dapat diukur hasilnya
3. Pengawasan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna anggaran dan PPTK dalam hal tertib pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan pelaporan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara garis besar capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022 sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien.

Dengan Indikator pengukuran sebagai berikut :

- Nilai SAKIP OPD target **70 (B)** Realisasi **66,43 (B)** capaian **94, 90%** Predikat **B** Katagori **Berhasil**.
- Persentase Inovasi yang terealisasi target 100% dengan 1 Inovasi, Realisasi **100%** dengan melakukan 1 Inovasi Katagori **Berhasil**
- Persentase Peningkatan Pemahaman terhadap kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat Target 10% terealisasi sebesar **0,49%** katagori **tidak berhasil**
- Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum target 77% Realisasi **78,66%** katagori **sangat berhasil**
- Persentase konflik ekonomi, sosial dan budaya yang ditangani target 100% Terealisasi **100%** katagori **berhasil**

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong secara keseluruhan tercapai, dengan rata **80,39 %**, maka dapat dikatakan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Rejang Lebong dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan **berhasil**, karena hampir semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan Sangat Baik. Efisiensi anggaran dari kegiatan yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 adalah sebesar **4,17%** Hal tersebut menunjukkan penggunaan anggaran yang tertib dengan melaksanakan asas manfaat.

B. Rencana Tindak Lanjut

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong, berkomitmen tinggi untuk melaksanakan tugas dan amanat yang diemban sesuai dengan Visi-Misi Bupati Rejang Lebong, RPJMD dan Renstra. Dengan adanya anjuran efisiensi, Lembaga terus berinovasi dengan tujuan tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Diakui bahwa tahun 2022 ini pelaksanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong mengalami beberapa kendala, dan kendala tersebut telah kami evaluasi dan tetapkan langkah perbaikan atau tindaklanjut untuk meningkatkan kinerjanya. Rencana tindaklanjut meliputi :

- a. Meningkatkan kualitas Perencanaan agar dokumen Perencanaan yang disusun dapat digunakan dan dapat mengurangi kesalahan/keraguan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Meningkatkan koordinasi dan melakukan penataan Birokrasi, sehingga terwujud penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih, efektif, efisien dan akuntabel
- c. Memberdayakna segala potensi yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong yaitu dengan melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan komitmen karyawan dan karyawan agar mampu berusaha lebih optimal dalam mencapai target.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja kepada semua bidang secara berkala.
- e. Memperkuat Komitmen dari semua bidang untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong.

Demikian Laopran Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaen Rejang Lebong Tahun 2022, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ Evaluasi untuk penyusunan kegiatan/kinerja pada masa mendatang.

Curup, Januari 2023
Pit. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
KABUPATEN REJANG LEBONG



M. S. Sos. MM
NIP. 83051992022001

LAMPIRAN - LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan. S. Sukowati No. 40 Curup Telp. (0732) 21308 - Kode Pos 39114

PERJANJIAN KINERJA-PERUBAHAN TAHUN 2022

Nomor: 060/267/BKBP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **MAX PINAL, SH., M.Si**

Jabatan : **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN REJANG LEBONG**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Drs. SYAMSUL EFFENDI, MM**

Jabatan : **BUPATI REJANG LEBONG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Curup, 2022

PIHAK KEDUA,
BUPATI REJANG LEBONG



Drs. SYAMSUL EFFENDI, MM

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
KABUPATEN REJANG LEBONG

MAX PINAL, SH., M.Si

Pembina TK. 1 / IV.b
NIP. 19680511 200212 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Tahun Anggaran : 2022

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	B
		Persentase Inovasi yang terealisasi	100%
2	Meningkatkan kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat	Persentase Peningkatan Pemahaman terhadap kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat	10%
3	Meningkatkan partisipasi Demokrasi Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	77%
4	Meningkatkan Ketahanan ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase konflik ekonomi, sosial dan budaya yang ditangani	100%

	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.539.904.890	
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	35.000.000,-	
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.119.679.165,-	
4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	45.000.000,-	
5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	35.000.000,-	
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	37.000.000,-	

Curup, 26 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



KEPALA
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN REJANG LEBONG

MAX PINAL, SH., M.Si
 NIP. 19680511 200212 1 004

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2022																								
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN REJANG LEBONG																								
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NDIKATOR	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN												CAPAIAN (%)
		TW. I		TW. II								TW. III		TW. IV										
		1	2	3	1							2	3	1	2	3	1	2	3					
Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD 100%							B												94,90				
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.133.088.677										95,91				
						Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				22.771.400														
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	PK, Renja, RKA,DPA	9.987.400														
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	10 Dok	RKA Perubahan, DPA Perubahan, PK Perubahan, Capaian Kinerja TW I, Capaian Kinerja TW II, Capaian Kinerja TW III, Capaian Kinerja TW IV, LKJP, LHE,	12.784.000														
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	350/orang	Gaji ASN	2.808.180.157	Sekretaris													
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen	Honor Pengelolah Keuangan dan Honor dan Honor THL	2.641.205.157	Sekretaris													
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan			166.975.000	Sekretaris													
						Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	Peralatan Listrik	203.516.420	Sekretaris													
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	Pengharum Ruangan dan kelengkapan ruang kepala Badan	5.483.000	Sekretaris													
										1.962.520	Sekretaris													

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KESBANGPOL Tahun 2022 Page 70

LAPORAN DATA KINERJA									
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN REJANG LEBONG 2022									
1. SASARAN : MENINGKATKAN KERUKUNAN DAN TOLERANSI DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT									
INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS	BENTUK DATA	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	TARGET	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PENGUNAAN ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Persentase Peningkatan Pemahaman terhadap Kerukunan dan Toleransi dalam Kehidupan Masyarakat	Nilai Akhir dibagi Nilai awal dikali 10	Pengisian Quisioner	824-820/820*100%	0,49%	10%	Program	35.000.000	34.320.000	98,06
		Nilai Pengisian Sebelum Sosialisasi = 820				PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			
						Kegiatan	35.000.000	34.320.000	
						Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			
		Nilai Pengisian Setelah Sosialisasi = 824				Sub Kegiatan	17.500.000	17.160.000	
						1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	17.500.000	17.160.000	
						2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	17.500.000	17.160.000	
2. SASARAN : MENINGKATKAN PARTISIPASI DEMOKRASI MASYARAKAT									
Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	Jumlah Pengguna Hak Pilih dibagi Jumlah Daftar Pemilih Tetap di kali 100	Jumlah Pengguna Hak Pilih = 159.937 Jiwa	159.937/203.336*100= 78,66	78,66%	77%	Program	1.102.619.165	1.094.686.602	99,28
		Jumlah Daftar pemilih Tetap = 203.336 Jiwa				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
						Kegiatan	1.102.619.165	1.094.686.602	
						1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.077.219.165	1.075.719.165	
						2 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	25.400.000	18.967.437	
						Program	27.866.000	23.677.600	84,97

2. SASARAN : MENINGKATKAN PARTISIPASI DEMOKRASI MASYARAKAT									
Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	Jumlah Pengguna Hak Pilih dibagi Jumlah Daftar Pemilih Tetap di kali 100	Jumlah Pengguna Hak Pilih = 159.937 jiwa	159.937/203.336* 100= 78,66	78,66%	77%	Program	1.102.619.165	1.094.686.602	99,28
						PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
		Jumlah Daftar pemilih Tetap = 203.336 Jiwa				Kegiatan	1.102.619.165	1.094.686.602	
						Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			
						Sub Kegiatan			
						1 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.077.219.165	1.075.719.165	
						2 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	25.400.000	18.967.437	
						Program	27.866.000	23.677.600	84,97

[illegible]

		Jumlah Konflik tahun 2022 = 0				Kegiatan	28.510.000	25.150.800	
						Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			
						Sub Kegiatan			
						Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	28.510.000	25.150.800	
						Program	192.700.000	148.640.000	77,14
						PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022					
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN REJANG LEBONG					
SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KEGIATAN	REALISASI	CAPAIAN	KETERANGAN
Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	B(70)	B(66,43)	94,90%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Akintabel dan Tepat waktu	100%	100%	100%	
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100%	100%	100%	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	100%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	10 dokumen	10 dokumen	100%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Adm Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	100%	100%	100%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	350/orang	350/orang	100%	
Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umu Perangkat Daerah Yang tepat waktu	100%	100%	100%	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	1 Paket	1 Paket	100%	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	
Penyedia Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	
Penyedia Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	12 paket	12 paket	100%	

Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 paket	100%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	12 laporan	100%	
Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam keadaan Baik	100%	100%	
Penyedia Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	100%	
Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	100%	
Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 laporan	100%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik	100%	100%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	10 unit	100%	
Meningkatnya kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat	Persentase Peningkatan pemahaman terhadap kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat	10%	0,49%	5%
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di Kabupaten Rejang Lebong	100%	100%	100%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pemahaman terhadap ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100%	100%	100%
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50 org	50 org	100%
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bid. ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	50 org	50 org	100%
Meningkatnya Partisipasi Demokrasi Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	77%	78,66%	102%

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	100%	100%	100%	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Jumlah partai politik yang tertib administrasi dan data yang akuntabel	100%	100%	100%	
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di	10 Parpol	10 Parpol	100%	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	15 Laporan	15 Laporan	100%	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong	100%		100%	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase terlaksananya Monitoring Ormas dan Ormas Asing dalam Kabupaten Rejang Lebong	100%	100%	100%	
Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftraan ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	30 Ormas	30 Ormas	100%	
Meningkatnya ketahanan Ekonomi, sosial dan budaya	Persentase Konflik ekonomi, sosial dan budaya yang ditangani	100%	100%	100%	

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Presentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kabupaten Rejang Lebong	100%	100%	100%	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Presentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan, Ekonomi, sosial dan Budaya	100%	100%	100%	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	jumlah orang yang mengikuti koordinasi dibidang ketahanan ekonomi,sosial dan budaya dan fasilitas pencegahan penyalagunaan nakotika,fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	90 orang	90 orang	100%	
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100%	100%	100%	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	dokumen rencana aksi Kewaspadaan dini, Penanganan Konflik sosial dan Pembauran Kebangsaan dikabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	jumlah orang yang mengikuti koordinasi dibidang kewaspadaan dini,kerjasama intelijen,pemantauan orang asing,tenaga kerja asing,kewaspadaan perbatasan antar negara fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan,serta penanganan konflik di daerah	60 orang	60 orang	100%	
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	

